



PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH

Jl. Prof. Muh. Yamin No. 1 Tlp. (0451) 454866, Fax. (0451) 454866
PALU 94117

Palu, 21 Agustus 2019

Nomor : W21-U/3498-HM.00/VIII/2019
Lampiran : 5 (lima) lembar.
perihal : Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XII Tahun 2019

Kepada Yth.

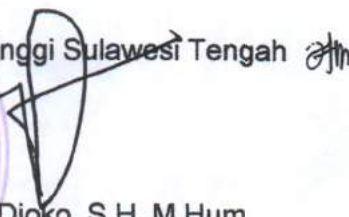
**Ketua Pengadilan Negeri Se- Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.**

Di -

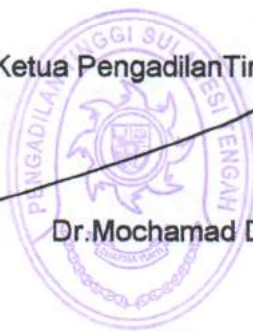
Wilayah Masing-masing

Menindak lanjuti surat Ketua Kamar Pidana selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XII Tahun 2019, tanggal 14 Agustus 2019, yang akan diselenggarakan secara serentak diseluruh indonesia, maka berkaitan dengan hal tersebut diminta kepada saudara untuk mengumumkan kegiatan yang dimaksud pada papan pengumuman dan website masing masing (formulir Terlampir).

Demikian untuk dilaksanakan , atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimah kasih.

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah 

Dr.Mochamad Djoko, S.H.,M.Hum





MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : (021) 3843348, 3810350, 3457661 fax. (021) 3810361
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Jakarta, 14 Agustus 2019

Nomor : 06 /Pansel/Ad Hoc TPK/VIII/2019.
Lampiran : 3 (tiga) lembar.
Perihal : Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XII Tahun 2019

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi

(daftar nama terlampir)

di –

Seluruh Indonesia

Sehubungan akan dilaksanakannya Seleksi Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahap XII Tahun 2019 yang pelaksanaannya akan diselenggarakan secara serentak pada Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia (daftar terlampir), berkaitan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Membentuk Panitia Daerah Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor dengan susunan meliputi : Penanggung Jawab, Ketua Pelaksana, Sekretaris dan Anggota, berjumlah maksimal 9 (sembilan) orang, kemudian Surat Keputusan Panitia Daerah tersebut dikirim ke Panitia Pusat.
2. Mengumumkan adanya seleksi kepada publik baik melalui papan pengumuman, website Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum masing-masing (pengumuman terlampir).
3. Pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc Tipikor dilakukan secara online dan apabila ada Peserta yang menyerahkan berkas ke Pengadilan Tinggi tetapi belum melakukan pendaftaran secara online diharapkan Panitia Daerah dapat memberikan panduan pendaftaran online pada website <http://adhoc.mahkamahagung.go.id>.
4. Menerima dan meneliti berkas Lamaran beserta persyaratan dari Pelamar berdasarkan formulir yang telah disediakan Panitia Seleksi (formulir terlampir), berkas lamaran paling lambat diterima Panitia Daerah tanggal 20 September 2019 dan kemudian berkas lamaran Peserta dikirimkan kepada Panitia Pusat Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi dan dialamatkan ke Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 Tromol Pos 1020 Jakarta Pusat 10110 melalui Titipan Kilat dikirimkan paling lambat pada tanggal 23 September 2019.

5. Mempersiapkan pelaksanaan ujian tertulis di Pengadilan Tinggi yang akan ditentukan kemudian setelah dilihat jumlah peserta yang mendaftar.
6. Untuk kelancaran pelaksanaan seleksi apabila ada ketentuan yang belum jelas, Panitia Daerah dapat menghubungi :
 - Saudara Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Suharto, SH., M.Hum. selaku Sekretaris Pansel HP. 08123402800 Telp/Fax. (021) 3860313.
 - Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum. selaku Wakil Sekretaris Pansel Hp. 081219097969.
 - M.E.R. Herki Artani Richmiani, SH., MH. selaku Sekretariat Pansel HP. 081319560882.
 - Fajar Andriansyah, ST. Informasi tentang sistem dan pendaftaran online HP. 085649569898.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI (sebagai laporan).
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.

Lampiran :

Daftar Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia :

1. Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
2. Pengadilan Tinggi Medan.
3. Pengadilan Tinggi Padang.
4. Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
5. Pengadilan Tinggi Jambi.
6. Pengadilan Tinggi Palembang.
7. Pengadilan Tinggi Bengkulu.
8. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
9. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
10. Pengadilan Tinggi Banten.
11. Pengadilan Tinggi Jakarta.
12. Pengadilan Tinggi Bandung.
13. Pengadilan Tinggi Semarang.
14. Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
15. Pengadilan Tinggi Surabaya.
16. Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
17. Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
18. Pengadilan Tinggi Pontianak.
19. Pengadilan Tinggi Samarinda.
20. Pengadilan Tinggi Makassar.
21. Pengadilan Tinggi Palu.
22. Pengadilan Tinggi Kendari.
23. Pengadilan Tinggi Manado.
24. Pengadilan Tinggi Gorontalo.
25. Pengadilan Tinggi Denpasar.
26. Pengadilan Tinggi Mataram.
27. Pengadilan Tinggi Kupang.
28. Pengadilan Tinggi Ambon.
29. Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
30. Pengadilan Tinggi Jayapura.



**PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XII
TAHUN 2019**

PENGUMUMAN

**PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP XII
NOMOR: 05/Pansel/Ad Hoc TPK/VIII/2019**

Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2019 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
4. Berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang Hukum (antara lain : Hukum Keuangan dan Perbankan, Hukum Administrasi, Hukum Pertanahan, Hukum Pasar Modal dan Hukum Pajak) sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
5. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran;
6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
7. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia;
9. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
10. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
11. Melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ;
12. Bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi;
13. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi;
14. Izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
15. Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia.

Pendaftaran dilakukan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat lamaran untuk menjadi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
- b. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat berwenang;
- c. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
- d. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit pemerintah;
- e. Surat Keterangan tidak pernah dihukum dari Pengadilan Negeri setempat;
- f. Surat Kelakuan Baik/SKCK dari Kepolisian;
- g. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota salah satu partai politik di atas kertas bermeterai Rp.6000,00;
- h. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,00;
- i. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermeterai Rp.6.000,00;
- j. Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- k. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,00;
- l. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 berwarna dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 4 (empat) lembar;
- m. Fotokopi KTP;
- n. Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
- o. Daftar Riwayat Hidup lengkap/riwayat pekerjaan lengkap selama 15 (lima belas) tahun dibidang hukum;
- p. Bukti telah melaporkan harta kekayaan dapat diserahkan setelah lulus ujian tertulis / pada saat ujian lisan.

Catatan :

1. Peserta yang pernah mengikuti seleksi tahap sebelumnya tetap melengkapi semua persyaratan yang baru seperti tersebut di atas (huruf a s/d p).
2. Pendaftaran dilakukan secara online melalui <http://adhoc.mahkamahagung.go.id> mulai tanggal 15 Agustus s/d 16 September 2019
3. Peserta yang telah melakukan pendaftaran online diwajibkan untuk mengirimkan seluruh persyaratan administrasi yang dimasukkan dalam amplop tertutup warna cokelat polos dan diserahkan kepada Panitia Daerah di Pengadilan Tinggi sesuai pendaftaran dengan mencantumkan Kode dan Nomor Telepon/HP pada sudut kanan atas Surat Permohonan maupun pada Amplop Surat.
 - Untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Pertama) : kode PN
 - Untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Banding) : kode PTberkas sudah diterima Panitia Daerah paling lambat tanggal 20 September 2019.
4. Pengumuman kelulusan administrasi dapat dilihat di Papan Pengumuman Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan pada website Mahkamah Agung www.mahkamahagung.go.id, www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, www.bawas.mahkamahagung.go.id, www.badilum.info, www.badilag.net dan www.ditjenmitun.com setelah tanggal 7 Oktober 2019.
5. Seleksi tertulis, Profile Assessment dan Wawancara, tempat dan waktu penyelenggaraan akan ditentukan kemudian.
6. Dalam ujian seleksi tertulis diperkenankan untuk membuka buku (*Open Book*).

Jakarta, 15 Agustus 2019

PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2019

Ketua,

ttd.

Dr. H. SUHADI, SH., MH.

Sekretaris,

ttd.

SUHARTO, SH., M.Hum.

**KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF
SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TAHAP XII TAHUN 2019**

NAMA PELAMAR :

NOMOR BERKAS :

KODE YANG DILAMAR : (PN / PT)*

TANGGAL TERIMA BERKAS :

1. Surat lamaran untuk menjadi Calon Hakim *Ad Hoc*. ☐
2. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat berwenang. ☐
3. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah. ☐
4. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Pemerintah. ☐
5. Surat Keterangan tidak pernah dihukum dari Pengadilan Negeri setempat. ☐
6. Surat Kelakuan Baik/SKCK dari Kepolisian ☐
7. Surat pernyataan tidak menjadi anggota salah satu partai politik di atas kertas bermaterai Rp.6000,00. ☐
8. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim *Ad Hoc* di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00. ☐
9. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermaterai Rp.6.000,00. ☐
10. Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. ☐
11. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00. ☐
12. Pas foto terbaru ukuran 4x6 berwarna sebanyak 4 (empat) lembar. ☐
13. Fotokopi KTP. ☐
14. Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir. ☐
15. Daftar Riwayat Hidup lengkap. ☐

KETERANGAN :	TTD & NAMA PEMERIKSA BERKAS
	(.....)

Catatan:

* Coret yang tidak perlu

Berkas disusun berdasarkan urutan Kelengkapan Persyaratan Administratif.



**PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XII
TAHUN 2019**

PENGUMUMAN

**PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP XII
NOMOR: 5 /Pansel/Ad Hoc TPK/VII/2019**

Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2019 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpenggal untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
4. Berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang Hukum (antara lain : Hukum Keuangan dan Perbankan, Hukum Administrasi, Hukum Pertanahan, Hukum Pasar Modal dan Hukum Pajak) sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
5. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran;
6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
7. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia;
9. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
10. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
11. Melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ;
12. Bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi;
13. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi;
14. Izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
15. Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia.

Pendaftaran dilakukan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat lamaran untuk menjadi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
- b. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat berwenang;
- c. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
- d. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit pemerintah;
- e. Surat Keterangan tidak pernah dihukum dari Pengadilan Negeri setempat;
- f. Surat Kelakuan Baik/SKCB dari Kepolisian;
- g. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota salah satu partai politik di atas kertas bermeterai Rp.6000,00;
- h. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,00;
- i. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermeterai Rp.6.000,00;
- j. Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- k. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,00;
- l. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 berwarna dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 4 (empat) lembar;
- m. Fotokopi KTP;
- n. Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
- o. Daftar Riwayat Hidup lengkap/riwayat pekerjaan lengkap selama 15 (lima belas) tahun dibidang hukum;
- p. Bukti telah melaporkan harta kekayaan dapat diserahkan setelah lulus ujian tertulis / pada saat ujian lisan.

Catatan :

1. Peserta yang pernah mengikuti seleksi tahap sebelumnya tetap melengkapi semua persyaratan yang baru seperti tersebut di atas (huruf a s/d p).
2. Pendaftaran dilakukan secara online melalui <http://adhoc.mahkamahagung.go.id> mulai tanggal 15 Agustus s/d 16 September 2019
3. Peserta yang telah melakukan pendaftaran online diwajibkan untuk mengirimkan seluruh persyaratan administrasi yang dimasukkan dalam amplop tertutup warna cokelat polos dan diserahkan kepada Panitia Daerah di Pengadilan Tinggi sesuai pendaftaran dengan mencantumkan Kode dan Nomor Telepon/HP pada sudut kanan atas Surat Permohonan maupun pada Amplop Surat.
 - > Untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Pertama) : kode PN
 - > Untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Banding) : kode PTberkas sudah diterima Panitia Daerah paling lambat tanggal 20 September 2019.
4. Pengumuman kelulusan administrasi dapat dilihat di Papan Pengumuman Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan pada website Mahkamah Agung www.mahkamahagung.go.id, www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, www.bawas.mahkamahagung.go.id, www.badilum.info, www.badilag.net dan www.ditjenmiltun.com setelah tanggal 7 Oktober 2019.
5. Seleksi tertulis, Profile Assessment dan Wawancara, tempat dan waktu penyelenggaraan akan ditentukan kemudian.
6. Dalam ujian seleksi tertulis diperkenankan untuk membuka buku (Open Book).

Jakarta, 15 Agustus 2019

PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2019

Ketua,
ttd.

Dr. H. SUHADI, SH., MH.

Sekretaris,
ttd.

SUHARTO, SH., M.Hum.